

PARTISIPASI AKTOR POLITIK DALAM WACANA MAKAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN LITERATUR ATAS KEPENTINGAN POLITIK

Oleh:

Muhammad Dicky Febrian¹

Tubagus Rizqul Munjazi²

Muhamad Ilham Al-mubarak³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: JL. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang,
Banten (42163).

Korespondensi Penulis: mdickyf94@gmail.com

Abstract. *This study discusses how political actors participate in the discourse surrounding the free nutritious meal program in Indonesia and how political interests influence the formation of this policy. Using a literature study approach, the article analyzes the dynamics of interaction between social issues, political agendas, and populist strategies. The findings reveal that although the free nutritious meal program was initially driven by concerns over malnutrition and stunting, in the context of electoral politics, the issue has transformed into a campaign tool and a symbol of political alignment. The program is often used to build the image of pro-people politicians but risks becoming merely a political promise if not supported by substantive and sustainable policy frameworks. Furthermore, narratives of child nutrition and poverty are frequently mobilized in populist rhetoric to garner voter sympathy. This study emphasizes the importance of integrating technocratic commitment with political responsibility to ensure that such programs truly bring positive and lasting impacts to society, rather than serving as short-term electoral instruments without clear development direction.*

Keywords: *Free Nutritious Meal, Political Actors, Political Interests, Populism, Symbolic Politics.*

PARTISIPASI AKTOR POLITIK DALAM WACANA MAKAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN LITERATUR ATAS KEPENTINGAN POLITIK

Abstrak. Penelitian ini membahas bagaimana aktor politik berpartisipasi dalam wacana program makan bergizi gratis di Indonesia serta pengaruh kepentingan politik dalam pembentukan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis dinamika interaksi antara isu-isu sosial, kepentingan politik, dan strategi populisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun program makan bergizi gratis awalnya dilatar belakangi oleh persoalan gizi dan stunting, dalam konteks politik elektoral isu ini mengalami transformasi menjadi alat kampanye dan simbol keberpihakan. Program ini dimanfaatkan untuk membangun citra politisi yang pro-rakyat, namun berisiko menjadi sekadar janji politik jika tidak didukung oleh kebijakan yang substansial dan berkelanjutan. Selain itu, terlihat pula bagaimana narasi gizi anak dan kemiskinan seringkali dimobilisasi dalam retorika populis guna memperoleh simpati pemilih. Kajian ini menekankan pentingnya integrasi antara komitmen teknokratis dan tanggung jawab politik agar program benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi instrumen elektoral jangka pendek tanpa arah pembangunan yang jelas.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis, Aktor Politik, Kepentingan Politik, Populisme, Politik Simbolik.

LATAR BELAKANG

Sebelum program makan bergizi gratis secara resmi diimplementasikan oleh pemerintah, telah berlangsung dinamika panjang yang melibatkan berbagai aktor politik dalam proses perumusan serta pembentukan wacana kebijakan tersebut. Kesadaran akan pentingnya perbaikan gizi nasional, upaya menurunkan angka stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sudah menjadi perhatian serius bagi banyak kalangan sejak beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 27,7 persen, yang berarti lebih dari seperempat anak-anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Walaupun upaya intervensi gizi telah dilakukan pemerintah, prevalensi stunting baru turun menjadi 21,6 persen pada tahun 2023. Angka ini masih jauh dari target nasional pemerintah yang menginginkan prevalensi stunting turun ke angka 14 persen pada tahun 2024. Selain itu, data ketidakcukupan konsumsi energi masyarakat Indonesia juga cukup memprihatinkan, di

mana pada tahun 2024 rata-rata konsumsi kalori penduduk Indonesia berada di angka 2051 kkal per orang per hari, masih di bawah standar kecukupan gizi ideal yang direkomendasikan.

Aktor-aktor birokrasi teknis seperti Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lembaga penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), telah memproduksi berbagai laporan, kajian ilmiah, dan hasil survei yang menegaskan bagaimana masalah kekurangan gizi dan stunting memiliki dampak besar bagi pembangunan nasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik semata, tetapi juga berdampak terhadap kualitas kognitif, produktivitas tenaga kerja, dan bahkan berkontribusi terhadap siklus kemiskinan antar generasi. Data Bank Dunia bahkan menyatakan bahwa kerugian ekonomi akibat stunting dapat mencapai 2 hingga 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam jangka panjang.

Seiring menguatnya temuan-temuan tersebut, aktor-aktor politik mulai melihat bahwa isu gizi ini memiliki potensi besar untuk diangkat ke panggung politik sebagai bagian dari agenda populis yang mampu menarik simpati masyarakat luas. Para elite partai politik, tim pemenangan calon presiden, serta anggota legislatif memperhitungkan bahwa program makan bergizi gratis akan sangat efektif secara elektoral karena menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat kecil. Isu ini tidak hanya menyentuh ranah kesehatan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara yang secara nyata memperhatikan kebutuhan rakyat, khususnya anak-anak yang selama ini rentan mengalami ketidakcukupan pangan. Program semacam ini dengan mudah bisa dijadikan komoditas politik yang menunjukkan empati, keberpihakan, sekaligus menjadi sarana penggalangan dukungan elektoral, terutama menjelang kontestasi pemilihan umum.

Dalam proses pembentukan gagasan kebijakan ini, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi gizi, akademisi, dan lembaga advokasi kesehatan turut memainkan peran aktif. Mereka berpartisipasi dengan menyuarakan pentingnya pemerintah mengambil langkah konkret mengatasi darurat gizi nasional, menyampaikan rekomendasi ilmiah berbasis data survei lapangan, serta menekan pengambil kebijakan untuk menjadikan isu gizi sebagai prioritas utama pembangunan. Media massa arus utama dan media sosial juga memperkuat tekanan publik dengan menyajikan banyak laporan, diskusi terbuka, dan kampanye daring yang memperlihatkan kesenjangan gizi di Indonesia serta dampak

PARTISIPASI AKTOR POLITIK DALAM WACANA MAKAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN LITERATUR ATAS KEPENTINGAN POLITIK

jangka panjangnya terhadap nasib generasi mendatang. Kesadaran kolektif masyarakat pun meningkat seiring dengan masifnya pemberitaan mengenai kasus-kasus stunting di berbagai daerah, baik di wilayah pedesaan, daerah tertinggal, maupun di kantong-kantong kemiskinan perkotaan.

Memasuki masa kontestasi pemilu, wacana yang semula berkembang secara akademis dan teknokratis tersebut diadopsi secara penuh oleh aktor-aktor politik utama sebagai bagian dari visi-misi kampanye nasional. Pada fase ini, partisipasi aktor politik semakin intensif, di mana gagasan teknis mengenai program makan bergizi gratis dikemas menjadi janji kampanye yang menarik bagi pemilih. Program ini secara resmi dimasukkan dalam dokumen visi pemerintahan sebagai salah satu program prioritas nasional dengan cakupan yang sangat luas, yakni diproyeksikan akan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah dasar, menengah, hingga kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui.

Dengan demikian, sejak awal sebelum terbentuknya program makan bergizi gratis, partisipasi aktor-aktor politik berlangsung dalam sebuah proses panjang yang menunjukkan adanya keterhubungan antara kepentingan ilmiah, advokasi publik, serta kalkulasi politik kekuasaan. Proses ini sekaligus mencerminkan bagaimana sistem politik Indonesia bekerja secara kompleks, di mana berbagai aktor saling memainkan peran, bernegosiasi, dan mempengaruhi arah kebijakan publik sebelum akhirnya diambil keputusan formal oleh pemerintah. Program makan bergizi gratis menjadi bukti nyata bagaimana suatu isu teknis yang awalnya lahir dari kajian ilmiah dan advokasi sosial, akhirnya bertransformasi menjadi agenda politik nasional yang sangat strategis secara elektoral.

Disisi lain, Program “makan bergizi gratis” menjadi dirkursus publik sebagai solusi kasus stunting dan perbaikan gizi di Indonesia. Dalam beberapa momentum politik, seperti pemilu dan pilkada 2024. Program makan gratis bukanlah ide baru, namun pada masa kontestasi politik, program ini mengalami transformasi menjadi alat kampanye dan politik simbolik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktor politik berpartisipasi dalam mendorong wacana makan bergizi gratis, serta bagaimana kepentingan politik memengaruhi pengusungan dan perumusan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, dengan menelaah literatur dan

hasil penelitian terdahulu untuk memahami dinamika aktor politik dan interaksinya dengan isu kebijakan sosial ini.

KAJIAN TEORITIS

Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah kesatuan yang terbentuk dari banyak unsur yang saling berkaitan secara struktural dan fungsional, di mana semua komponennya bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Sistem ini mencerminkan suatu proses pengelolaan kekuasaan dalam masyarakat Indonesia yang dijalankan oleh lembaga-lembaga yang sah, Sistem politik Indonesia merupakan kombinasi unik antara presidensialisme dan demokrasi multipartai. Dalam kerangka teori Trias Politika yang diperkenalkan oleh Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Rasji, Syamila, dan Michellena (2024) menjelaskan bahwa dalam praktiknya, sistem ini dijalankan secara formal melalui pembagian kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun, praktik pemisahan kekuasaan ini sering menghadapi tantangan implementatif akibat tarik-menarik kepentingan di antara lembaga negara. Dalam sistem politik, semua tindakan dan keputusan diarahkan untuk mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat secara otoritatif. Nilai-nilai yang dimaksud meliputi kesejahteraan, keadilan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam kajian ilmu politik, sistem politik dapat dipahami sebagai suatu kesatuan interaksi antara lembaga, aktor, serta proses yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana kebijakan publik dihasilkan dalam suatu negara. David Easton (dalam Anggara, 2013) menjelaskan bahwa sistem politik merupakan sebuah sistem yang secara terus-menerus menerima masukan berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang kemudian diproses melalui lembaga-lembaga pengambil keputusan untuk menghasilkan kebijakan publik sebagai *output*. Kebijakan ini kemudian memunculkan reaksi atau umpan balik dari masyarakat, yang pada akhirnya kembali menjadi masukan baru bagi sistem politik. Dengan demikian, sistem politik menurut Easton bersifat dinamis dan sirkular karena terus bergerak berdasarkan interaksi antara input, proses pengambilan keputusan, *output*, dan *feedback*.

PARTISIPASI AKTOR POLITIK DALAM WACANA MAKAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN LITERATUR ATAS KEPENTINGAN POLITIK

Di sisi lain, Harold D. Lasswell (dalam Anggara, 2013) memandang politik dari sudut yang lebih sederhana namun substansial. Ia merumuskan politik sebagai proses penentuan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Definisi ini menekankan bahwa politik pada dasarnya merupakan proses distribusi sumber daya dalam masyarakat yang diatur oleh aktor-aktor politik yang memiliki kekuasaan. Dalam pengambilan keputusan politik, terdapat proses alokasi nilai-nilai publik seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya yang semuanya melibatkan keputusan siapa yang berhak menerima manfaat, berapa banyak manfaat yang diterima, dan dengan mekanisme apa manfaat tersebut disalurkan. Teori ini menempatkan distribusi sumber daya sebagai inti dari proses politik yang tidak lepas dari kepentingan, kekuasaan, dan strategi para aktor politik.

Selain itu, Gabriel Almond juga berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang sistem politik dengan menekankan pentingnya fungsi-fungsi dalam sistem politik, seperti fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, fungsi pembuatan kebijakan, fungsi penerapan kebijakan, serta fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut menjelaskan bagaimana bagaimana sistem politik bekerja secara fungsional untuk mengelola berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat sehingga menghasilkan keputusan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi artikulasi kepentingan misalnya, menjelaskan bagaimana kebutuhan masyarakat diidentifikasi dan disuarakan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Fungsi agregasi kepentingan berkaitan dengan bagaimana kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut dirumuskan menjadi agenda kebijakan. Sementara itu, fungsi pembuatan kebijakan, penerapan, dan pengawasan menunjukkan bagaimana kebijakan dijalankan dan dikontrol agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian mengenai partisipasi aktor politik dalam wacana makan bergizi gratis, ketiga teori tersebut memberikan kerangka analisis yang relevan. Program makan bergizi gratis merupakan contoh konkret dari bagaimana sistem politik bekerja memproses input berupa tuntutan perbaikan gizi masyarakat menjadi kebijakan negara. Proses distribusi sumber daya dalam bentuk program makan bergizi gratis juga mencerminkan gagasan Lasswell mengenai bagaimana para aktor politik menentukan siapa yang menerima manfaat program tersebut, kapan pelaksanaannya dimulai, serta bagaimana program itu dijalankan di lapangan. Fungsi-fungsi sistem politik yang

dijelaskan Almond terlihat jelas dalam bagaimana kebutuhan gizi nasional diartikulasikan oleh lembaga teknis, kemudian diagregasikan menjadi agenda politik, selanjutnya diformalkan dalam kebijakan oleh lembaga pengambil keputusan, diterapkan oleh birokrasi, dan diawasi pelaksanaannya oleh berbagai lembaga pengawas serta masyarakat.

Teori Kepentingan Politik

Teori kepentingan dalam ilmu sosial dan politik berangkat dari pandangan bahwa individu maupun kelompok bertindak untuk memenuhi tujuan tertentu yang dianggap penting bagi keberlangsungan, kekuasaan, atau kesejahteraan mereka. Menurut Muhsin & Yuni Siswanti (2018) Kepentingan merupakan konsep kunci dalam ilmu sosial karena menjadi dasar seseorang atau kelompok dalam mengambil tindakan sosial. Menurut mereka, individu tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan aktor lain dalam merealisasikan tujuan tersebut .

Menurut Febriansyah (2022), Kepentingan dalam politik bukan semata-mata demi kepentingan publik, melainkan banyak dipengaruhi oleh muatan kepentingan kelompok tertentu atau elit yang mendesakkan aspirasinya ke dalam kebijakan. Kepentingan politik tidak lepas dari *teori Public Choice*, yang menjelaskan bahwa aktor-aktor dalam sistem politik bertindak secara rasional layaknya pelaku ekonomi. Mereka cenderung memilih tindakan politik yang dapat memaksimalkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Seperti dijelaskan oleh Peter Self (2014), dalam politik modern, motivasi utama politisi dan partai bukan semata nilai atau ideologi, melainkan kekuasaan, pendapatan, dan legitimasi .

Dengan demikian, teori kepentingan dan kepentingan politik memberikan pemahaman bahwa kebijakan publik dan perilaku politik tidak dapat dilepaskan dari dinamika kepentingan. Dalam banyak kasus, proses politik adalah medan kompetisi antara berbagai aktor yang membawa agenda dan kepentingan yang berbeda, yang saling berupaya mendominasi ruang kebijakan demi keuntungan masing-masing.

Populisme dan Politik Simbolik

Populisme merupakan gaya politik yang mengklaim keberpihakan terhadap “rakyat biasa” dan menempatkan diri sebagai antitesis dari elite yang dianggap korup atau

PARTISIPASI AKTOR POLITIK DALAM WACANA MAKAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN LITERATUR ATAS KEPENTINGAN POLITIK

jauh dari rakyat. Dalam konteks Indonesia, populisme sering tampil dalam bentuk simbolik, seperti narasi "pemimpin rakyat", "negara hadir", dan penggunaan identitas keagamaan atau nasionalisme.

Para pemikir dan ahli teori belum mencapai kesepakatan akhir mengenai definisi pasti dari populisme. Cas Mudde dan Cristobal Rovira Kaltwasser dalam buku *Populism: A Very Short Introduction* menyebut populisme sebagai sebuah ideologi politik. Sementara itu, tokoh lain seperti Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, dan Kaltwasser sendiri melihat populisme sebagai doktrin, strategi, atau bahkan gerakan politik (Welak, 2022). Berbagai pendapat tersebut menunjukkan bahwa populisme dapat dimaknai sebagai ideologi, strategi, maupun gerakan, namun semuanya memiliki akar yang sama, yaitu politik. Karena itu, membahas populisme tanpa mengaitkannya dengan politik menjadi hal yang sulit. Populisme tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, karena ia hanya muncul dan beroperasi dalam ruang politik. Dengan demikian, dalam tulisan ini dapat ditegaskan bahwa populisme merupakan bentuk dari gerakan politik (Wijanarko, 2021)

Menurut Sahlan & Ahmad (2024) mendefinisikan populisme sebagai fenomena yang dapat dikenali melalui "sikap, perilaku dan retorika politik" yang mempertegas perlawanan antara rakyat dan elite, sebagai strategi mobilisasi massa. Sementara itu, menurut Vedi Hadiz (2016), populisme di Indonesia sering digunakan oleh elite lama untuk memperbarui legitimasi mereka, terutama melalui populisme Islam. Identitas keagamaan dijadikan alat simbolik untuk memobilisasi dukungan massa tanpa perlu reformasi struktural yang berarti

Gunawan dan Paramita (2024) meneliti konstruksi populisme dalam media online saat Pilkada DKI 2017 dan menemukan bahwa kandidat seperti Anies Baswedan mengusung populisme berbasis identitas dan keadilan sosial, sementara lawannya lebih teknokratik. Populisme ini dibangun melalui media digital sebagai sarana penyebaran pesan politik yang simbolik, seperti kehadiran di pasar rakyat atau kunjungan ke sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama. Menurut Nazir (2014) dalam Putrihapsari & Fauziah (2020), studi literatur merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penggunaan metode ini

dimaksudkan sebagai langkah awal dalam proses penelitian, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi atau data dari literatur tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, seperti hasil penelitian, laporan ilmiah, dan artikel jurnal, serta sumber sekunder, yang mencakup dokumen peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur lain yang relevan dengan topik kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makan Bergizi Gratis sebagai Wacana Politik

Program makan bergizi gratis awalnya dimunculkan sebagai respon atas persoalan gizi dan stunting yang telah lama menjadi perhatian publik dan lembaga teknis negara. Persoalan ini bukan hal baru dalam konteks pembangunan Indonesia, karena sejak beberapa dekade terakhir isu ketimpangan akses pangan dan gizi telah menimbulkan dampak multidimensi terhadap generasi muda, terutama anak-anak usia sekolah dasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi *Statistik Kesejahteraan Rakyat* tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia memang menunjukkan penurunan, dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 21,6 persen pada 2023. Namun angka tersebut masih cukup tinggi dan belum mencapai target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) juga menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi penduduk Indonesia pada 2023 hanya sekitar 2051 kkal per kapita per hari, masih di bawah angka kebutuhan energi minimum nasional sebesar 2100 kkal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin, yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Di sisi lain, disparitas gizi juga tampak jelas antara daerah perkotaan dan pedesaan, bahkan antarprovinsi, yang membuat isu ini semakin kompleks untuk ditangani tanpa adanya intervensi kebijakan besar dari pemerintah pusat. Dalam situasi tersebut, munculnya wacana makan bergizi gratis menjadi angin segar, karena dipersepsikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak-anak, yaitu hak untuk sehat dan memperoleh makanan layak.

PARTISIPASI AKTOR POLITIK DALAM WACANA MAKAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN LITERATUR ATAS KEPENTINGAN POLITIK

Namun, seiring waktu, program ini mengalami pergeseran makna menjadi bagian dari wacana politik, terutama dalam momentum politik elektoral seperti pemilu dan pilkada. Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis tidak hanya diposisikan sebagai solusi atas masalah sosial, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat miskin, meningkatkan elektabilitas kandidat, dan memperkuat citra populis dari aktor-aktor politik tertentu. Narasi keberpihakan terhadap rakyat kecil ini menjadi sangat kuat, terutama di tengah kondisi ekonomi pasca-pandemi yang membuat masyarakat semakin sensitif terhadap isu pangan dan pengeluaran harian.

Wacana ini diperkuat dengan narasi-narasi politis yang dibangun melalui media massa dan media sosial, sehingga menciptakan persepsi bahwa partai atau tokoh politik yang mengusung program ini adalah pihak yang paling peduli terhadap nasib masyarakat kecil. Visualisasi kampanye yang menampilkan calon pemimpin berbagi makanan dengan anak-anak, berkunjung ke sekolah, dan menyampaikan janji makan gratis menjadi bagian dari upaya membangun citra kepemimpinan yang peduli dan merakyat. Isu ini pun dibingkai sebagai bentuk nyata dari keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak usia sekolah dan keluarga miskin.

Pada akhirnya, program makan bergizi gratis menjadi simbol komitmen politik terhadap keadilan sosial, meskipun dalam implementasinya, program ini masih harus melalui tahapan teknokratis yang panjang dan membutuhkan anggaran yang besar. Pemerintah akan dihadapkan pada tantangan bagaimana mengintegrasikan program ini ke dalam struktur anggaran negara dan sistem pendidikan, tanpa menimbulkan beban fiskal yang berat atau konflik koordinasi antarinstansi. Dengan skala target yang mencakup puluhan juta penerima manfaat, termasuk siswa SD, SMP, hingga kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, maka desain kebijakan, logistik distribusi, dan pengawasan mutu menjadi aspek krusial yang harus dikawal dengan ketat. Tanpa perencanaan yang matang dan komitmen politik yang berkelanjutan, program ini berisiko menjadi sekadar janji kampanye yang gagal memenuhi harapan rakyat.

Aktor Politik dan Kepentingan di Balikny

Berbagai aktor politik, baik dari kalangan partai, calon legislatif, hingga kandidat eksekutif, secara aktif menggunakan isu makan bergizi gratis sebagai strategi kampanye dan mobilisasi dukungan publik, terutama menjelang Pemilu 2024. Isu ini diangkat

karena memiliki daya tarik emosional yang kuat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil pascapandemi. Data dari BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 9,36 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan konsentrasi kemiskinan tertinggi berada di wilayah perdesaan. Kondisi ini menjadi celah politik yang dimanfaatkan aktor-aktor politik untuk menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat miskin melalui program makan bergizi gratis. Dengan menysasar anak-anak sekolah dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat, program ini dinilai mampu menjangkau langsung basis suara yang luas, sekaligus membangun citra empati dan kepedulian sosial para kandidat.

Kepentingan yang dibawa oleh para aktor ini sangat beragam. Di satu sisi, mereka ingin meningkatkan elektabilitas dengan membangun citra sebagai pemimpin yang hadir dan peduli terhadap isu dasar seperti pangan dan gizi. Di sisi lain, pengusunan program ini juga menjadi sarana memperluas basis massa dan menunjukkan bahwa visi-misi politik mereka selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Dalam banyak pidato dan debat politik, wacana makan bergizi gratis dijadikan simbol keadilan sosial dan solusi konkret terhadap masalah stunting serta ketimpangan ekonomi. Bahkan dalam dokumen visi-misi beberapa kandidat capres dan partai politik, program ini dijadikan sebagai salah satu prioritas utama untuk periode pemerintahan mendatang, menunjukkan seberapa besar daya tawar politik yang dimiliki isu ini di ruang publik.

Partisipasi aktor politik tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Di berbagai daerah, kepala daerah, anggota DPRD, hingga calon kepala daerah mulai menggagas program serupa dengan menyesuaikan konteks lokal. Mereka mencoba menunjukkan bahwa mereka mampu mengimplementasikan kebijakan yang berskala nasional ke dalam level pemerintahan lokal yang langsung menyentuh masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh legitimasi publik dan dukungan konstituen menjelang pilkada. Dalam beberapa kasus, program makan bergizi gratis bahkan telah diujicobakan dalam bentuk subsidi makanan di sekolah atau kerjasama dengan dinas pendidikan dan kesehatan untuk mendistribusikan makanan bergizi di lingkungan sekolah negeri.

Namun, di tengah euforia janji politik ini, muncul kekhawatiran bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi alat manipulasi politik semata. Para pemilih yang sebagian besar berasal dari kelompok rentan ekonomi sering kali melihat janji ini sebagai bentuk konkrit dari keberpihakan negara, meskipun mereka belum tentu memahami

PARTISIPASI AKTOR POLITIK DALAM WACANA MAKAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN LITERATUR ATAS KEPENTINGAN POLITIK

secara menyeluruh mengenai aspek teknis pelaksanaan, sumber anggaran, atau keberlanjutan kebijakan ini dalam jangka panjang. Hal ini menciptakan ruang bagi politisi untuk menjual program ini sebagai komoditas elektoral tanpa komitmen substansial terhadap pelaksanaannya pasca pemilu. Maka dari itu, meskipun program ini efektif dalam menjaring suara rakyat, ia juga sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek, apalagi tanpa adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kebijakan yang ketat dari publik maupun lembaga pengawas negara.

Wacana Populisme dan Politik Simbolik

Program makan bergizi gratis erat kaitannya dengan strategi populisme, di mana politisi menempatkan diri sebagai pembela rakyat kecil yang selama ini dianggap diabaikan oleh elit atau sistem. Pada dasarnya, wacana ini menyederhanakan permasalahan besar seperti ketimpangan akses pangan dan stunting menjadi solusi cepat: “Saya hadir, saya beri makan gratis.” Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting menurun dari 21,5 % pada 2023 menjadi 19,8 % pada 2024. Tetapi angka ini tetap jauh dari target RPJMN 2029 sebesar 14,2 %. Penurunan ini memberikan legitimasi politis bagi program makan bergizi gratis, karena di satu sisi tampak selaras dengan upaya memperbaiki gizi, namun di sisi lain menyuguhkan narasi dramatis: “Negara turun tangan lewat tindakan nyata.” Simbolisme politik terlihat jelas saat kampanye: politisi berkunjung ke sekolah, makan bersama siswa, memilih menu yang mudah dikenali contohnya nasi, tempe, tahu, atau sayur buncis dan membagikan gambar atau video ke media sosial. Visual tersebut menciptakan kesan empati dan cinta terhadap rakyat kecil. Namun, ada proses dramatisasi di balik itu. Penggunaan simbol-simbol emosional dimaksudkan agar publik merasakan kedekatan, sementara faktanya banyak detail teknis yang diabaikan. Seperti yang disinggung dalam diskusi publik, beberapa anak menolak menu tertentu misalnya sayur buncis atau tempe karena tidak sesuai selera, atau sudah kenyang sebelumnya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa di balik simbol kehadiran negara, terdapat persoalan sejati: ketersediaan variasi menu, selera lokal, dan porsi gizi yang tepat. Lebih penting lagi, politik simbolik seperti ini rawan efek dangkal: ia mengedepankan citra ketimbang substansi. Anggaran besar dialihkan untuk acara publik, dokumentasi, dan citra politik, bukan penguatan logistik, distribusi, dan pengawasan mutu. Padahal, pekerjaan berat

seperti penyiapan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak, pelibatan petani lokal agar mendukung suplai pangan, serta pelatihan tenaga dapur sekolah memerlukan komitmen yang lama dan koordinasi lintas sektor. Tanpa kerangka kebijakan jangka panjang, pengawasan yang konsisten, dan evaluasi berbasis data, apa yang tampak sebagai "kasih sayang negara" bisa jadi sekadar aksi panggung politik. Sementara target penurunan prevalensi stunting yang ambisius (18 % pada 2025) memerlukan ketepatan program dan kesinambungan. Jika tidak diikuti langkah-langkah teknis yang kuat, wacana populis ini justru berisiko hanya menjadi momentum sesaat: diliput media, diapresiasi publik, lalu memudar setelah pemilu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Wacana makan bergizi gratis di Indonesia memperlihatkan bagaimana isu penting yang awalnya lahir dari kebutuhan dasar—seperti gizi anak dan penurunan angka stunting—berubah menjadi bagian dari strategi politik. Banyak aktor politik memanfaatkan program ini sebagai cara untuk menunjukkan empati dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, terutama menjelang momen-momen pemilu. Melalui narasi populis dan simbol-simbol emosional seperti makan bersama anak-anak di sekolah, mereka membangun citra pemimpin yang peduli dan dekat dengan rakyat.

Namun, di balik janji-janji tersebut, muncul kekhawatiran bahwa program ini bisa saja berhenti sebagai alat kampanye belaka. Tanpa perencanaan matang, anggaran yang realistis, dan pelaksanaan yang serius, program ini berisiko gagal menjawab masalah nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam hal gizi dan ketimpangan akses pangan. Oleh karena itu, partisipasi aktor politik harus lebih dari sekadar retorika. Diperlukan komitmen jangka panjang yang nyata agar program ini benar-benar membawa perubahan bagi generasi mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2023*. Jakarta: BPS.

PARTISIPASI AKTOR POLITIK DALAM WACANA MAKAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN LITERATUR ATAS KEPENTINGAN POLITIK

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kesejahteraan rakyat 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Susenas Maret 2023: Konsumsi dan pengeluaran penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Febriansyah, F. I. (2022). Muatan kepentingan politik penentu kualitas undang-undang. *Perspektif*, 17(3).
- Gunawan, K. A., & Paramita, S. (2023). Konstruksi aspek-aspek populisme aktor politik pada media online melalui perspektif identitas sosial. *Koneksi*, 8(1), 132–141.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Laporan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kompas. (2024). Wacana makan gratis dan tantangan implementasinya di sekolah. Diakses dari <https://www.kompas.id>
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Muhsin, M., & Siswanti, Y. (2018, September). *Sosiologi kepentingan (interest) dalam tindakan ekonomi. Paper presented at Digital Social Sciences, Humanities and Education Conference, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Putrihapsari, R., & Fauziah, P. Y. (2020). Manajemen pengasuhan anak usia dini pada ibu yang bekerja: Sebuah studi literatur. *VISI: Jurnal Ilmiah PTK PNF*, 15(2), 127–136.
- Rasji, R., Syamila, N., & Michellena, M. (2024). Penerapan teori trias politika dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 10(1), 95–106.
- Sahlan, M., & Ahmad, M. Y. (2023). Memahami fenomena populisme di abad ke-21: *Understanding the phenomenon of populism in the 21st century. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAl)*, 4(1), 119–139.
- Self, P. (2014). *Political theories of modern politics: Reinterpreted from public choice framework*. London: Routledge.

Tirto.id. (2023). Politik makan gratis dan janji pemilu: Efektifkah? Diakses dari <https://tirto.id>

Welak, F. (2022). Populisme di Indonesia: Ancaman bagi integritas masyarakat dan reaktualisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 62–70.

Wijanarko, R. (2021). Religious populism and public sphere in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*.